



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sharil alias Sahril bin Janatun, NIK 7206010905710001, Tempat dan tanggal lahir (umur) Tandoyondo, 09 Mei 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Asrianti Kamaru binti Lamaha, NIK 7206016707750001, Tempat dan tanggal lahir (umur) Mondowe, 27 Juli 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-butki yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 06 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 08 Agustus 2019 dengan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA. Buk., para Pemohon memohon agar diitsbatkan pernikahan mereka dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 19985Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara) dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamaha Kamaru dan yang menikahkan Imam Desa Peleru bernama Ahmad Lamadenserta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Todingan dan Asrul Kamaru dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;gsebes30000,-
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 4.1 Dewi Santri Putri, umur 20 tahun;
 - 4.2 Mastika A., umur 11 tahun;
 - 4.2 Nur Ramadhani, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Juni 1998; 23
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sharil alias Sahril bin Janatun**) dengan Pemohon II (**Asrianti Kamaru binti Lamaha**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1998 di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso (sekarang Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Buk tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan sejak tanggal tersebut berlangsung

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan itsbat para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk mengesahkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206010905710001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tanggal 11 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206016707750001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 18 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7206142608130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali pada tanggal 29 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

Saksi I, M. Todingan bin Soalik, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso saat itu.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamaha Kamaru;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid bernama Ahmad Lamade setelah ayah kandung Pemohon II menyerahkan langsung kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Asrul Kamaru.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat,-.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 23 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II, Asrul bin Kamaru, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai kakak

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso saat itu.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamaha Kamaru;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid bernama Ahmad Lamade setelah ayah kandung Pemohon II menyerahkan langsung kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan M. Todingan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat,-.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 23 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim setelah menerima Penunjukan Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diitsbatkan pernikahannya dengan alasan bahwa pada tanggal 27 Juni 1998 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, hal. 144 huruf angka (1) dan (2), yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilaksanakan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan *a quo*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *voluntair* dan Pemohon I

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni M. Todingan dan Asrul Kamaru;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1998 di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamaha Kamaru, pernikahan dilaksanakan dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama M. Todingan dan Asrul Kamaru;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab kabul yang dilakukan oleh imam desa yang bernama Ahmad Lamade setelah ayah kandung Pemohon II menyerahkan secara langsung kepada imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usian 23 tahun;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari: a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1998 di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamaha Kamaru, telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan imam mesjid bernama Ahmad Lamade dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Todingan dan Asrul Kamaru.

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah mewakilkan kepada imam bernama Ahmad Lamade, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi, dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24].”

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan pada saat dilangsungkan acara pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, begitupun selama surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditempel (diumumkan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 (empat belas) hari, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan ataupun intervensi, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa seperangkat alat shalat,, maka berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat,.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam alasan sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, dan juga dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan menguatkan identitas hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan melindungi hak dan kepentingan bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai pasangan suami isteri, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 1998 di Desa Peleru, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso, dapat dinyatakan sah. Dengan demikian, petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon.;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **(Sharil alias Sahril bin Janatun)** dengan Pemohon II, **(Asrianti Kamaru binti Lamaha)** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Hj. Sukirah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 400.000,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA Buk.